

IDENTIFICATION OF POTENCY AND PROBLEM OF SLUMS AREA IN KAPUAS REGENCY

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN PERMUKIMAN KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN KAPUAS Amiany¹

¹ Staf Pengajar Jurusan Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

Indonesia as a developing country with an unstable demographic condition is reflected in an uncontrolled population growth rate. The severity of the large population is not accompanied by improvement and good economic growth. Impaired economic conditions further increase the poverty rates in Indonesia which impacts on the degradation of physical and non-physical conditions of life and livelihoods of the community which is clearly and clearly reflected in the declining quality of the environment in which people live. Even the worst is the formation of slums or slums.

Slum areas in Kapuas Regency are dominant in the riverbanks. In accordance with the slum area criteria that the area has irregular, densely populated, unsuitable quality of buildings, and are not equipped with proper utilities (roads, clean water, waste water, drainage and waste disposal) with community income levels the low one.

Handling the Problem of Slum Settlements is part of the anticipation of urban impacts from the improvement of the function of the region into a center of growth and to plan the space of more humane settlements in the future. Less-integrated and less targeted housing and settlements, and less attention to the completeness of basic infrastructure and facilities such as clean water, sanitation, waste management systems and rain drainage channels, will tend to degrade environmental quality or later be terminated as "Slums Area".

Keywords: Identification, Potentials and Problems, Slums

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi demografi yang tidak stabil tercermin pada angka pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Parahnya jumlah penduduk yang cukup besar tidak dibarengi dengan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kondisi perekonomian yang morat-marit semakin menambah angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pada degradasi kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat yang secara nyata dan jelas tercermin pada menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakatnya. bahkan yang paling buruk adalah terbentuknya permukiman kumuh atau kawasan kumuh.

Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kapuas yaitu dominan terletak di kawasan bantaran sungai. Sesuai dengan kriteria kawasan kumuh bahwa kawasan tersebut memiliki pola permukiman yang tidak teratur, padat, kualitas bangunan tidak layak huni, serta tidak dilengkapi sarana dan prasarana utilitas (jalan, air bersih, air limbah, drainase dan sisten persampahan) yang baik dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.

Penanganan Masalah Permukiman Kumuh ini merupakan bagian dariantisipasi dampak perkotaan dari peningkatan fungsi kawasan menjadi pusat pertumbuhan dan guna merencanakan ruang kawasan permukiman yang lebih manusiawi kedepannya. Perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai "Kawasan Kumuh"

Kata Kunci: Identifikasi, Potensi dan Masalah, Permukiman Kumuh

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi demografi yang tidak stabil tercermin pada angka pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Parahnya jumlah penduduk yang cukup besar tidak dibarengi dengan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kondisi perekonomian yang morat-marit semakin menambah angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pada degradasi kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat yang secara nyata dan jelas tercermin pada menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakatnya. Dari 2 (dua) hal pokok inilah, yakni: angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan kondisi perekonomian yang buruk, terjadilah apa yang disebut dengan permasalahan perumahan dan permukiman bahkan yang paling buruk adalah terbentuknya permukiman kumuh atau kawasan kumuh.

Kabupaten Kapuas sangat strategis bila dilihat dari segi lokasi, berada tepat di perlintasan jalan transkalimantan bagian selatan menghubungkan Kota Palangka Raya dengan Banjarmasin baik sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pelayanan pemerintahan di wilayah Kapuas, merupakan daya tarik (attracting power) tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk tinggal menetap di daerah ini guna memperoleh kemudahan akses. Hal ini tentunya turut berpengaruh terhadap kebutuhan akan lahan permukiman dan infrastruktur kota.

Kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas dominan terletak di kawasan bantaran sungai. Sesuai dengan kriteria kawasan kumuh bahwa kawasan tersebut memiliki pola permukiman yang tidak teratur, padat, kualitas bangunan tidak layak huni, serta tidak dilengkapi sarana dan prasarna utilitas (jalan, air bersih, air limbah, drainase dan sisten persampahan) yang baik dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.

Penanganan Masalah Permukiman Kumuh ini merupakan bagian dari antisipasi dampak perkotaan dari peningkatan fungsi kawasan menjadi pusat pertumbuhan dan guna merencanakan ruang kawasan permukiman yang lebih manusiawi kedepannya. Perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai "Kawasan Kumuh".

Kondisi seperti itu sudah semestinya mendapat perhatian dan dilakukan secara terus menerus dengan memberikan dorongan kepada pemerintah Kabupaten untuk menempatkan penanganan kawasan kumuh

dan kemiskinan yang ada secara sungguh-sungguh dan meletakkannya pada prioritas utama pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota serta Rencana dan Strategi (Renstra) Sektoral di wilayahnya.

Rumusan Masalah

"Bagaimana Identifikasi Potensi dan masalah Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kapuas? "

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan di atas maka tujuan penelitian di wilayah studi yaitu mengidentifikasi potensi dan masalah kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kapuas.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif. Dalam penelitian ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dalam bentuk data-data yang bisa di analisa dengan kajian diskripsi.

LANDASAN TEORI

Definisi Tentang Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011).

Upaya penanganan permukiman kumuh telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yang menyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai tataruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak huni dan perlu diremajakan.

Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh

Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok kedalam kriteria:

- Vitalitas Non Ekonomi
- Vitalitas Ekonomi Kawasan
- Status Kepemilikan Tanah
- Keadaan Prasarana dan Sarana
- Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota
- Prioritas Penanganan

Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.

Kriteria Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria Vitalitas Non Ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi.

Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut:

- a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.
- b. Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.
- c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

Kriteria Vitalitas Ekonomi

Kriteria Vitalitas Ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan city without slum sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi:

- a. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.

- b. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya.
- c. Jarak jangkauan kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh.

Kriteria Status Tanah

Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan.

Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:

- a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.
- b. Status sertifikat tanah yang ada.

Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana

Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:

- a. Kondisi Jalan
- b. Drainase
- c. Air bersih
- d. Air limbah

Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat

Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya.

Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi:

- a. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.
- b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (*grand scenario*) kawasan, rencana induk (*master plan*) kawasan dan lainnya.

Kriteria Prioritas Penanganan

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini akan

menghasilkan lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut:

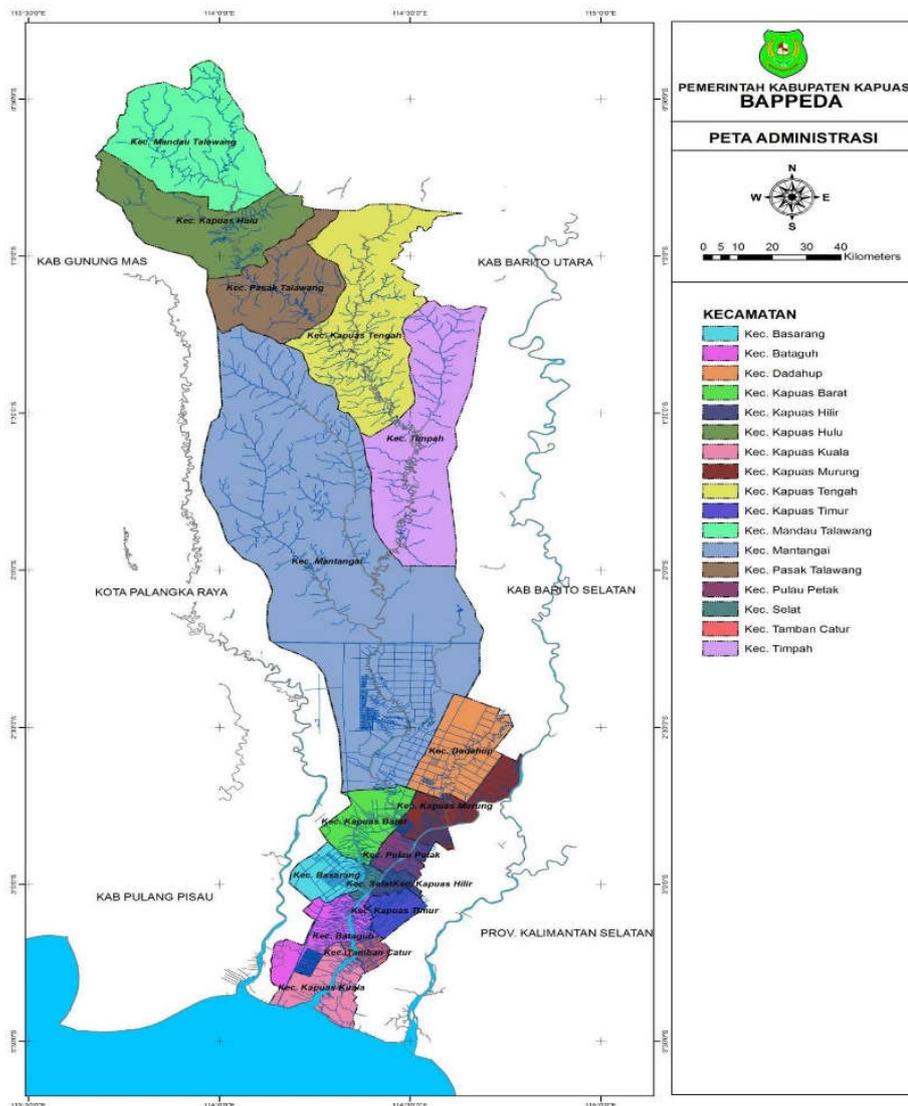
- Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.
- Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat
- pertumbuhan bagian kota metropolitan.
- Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan.
- Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kapuas

Kawasan kumuh di Perkotaan Kapuas yaitu dominan terletak di kawasan bantaran sungai. Sesuai dengan kriteria kawasan kumuh bahwa kawasan tersebut memiliki pola permukiman yang tidak teratur, padat, kualitas bangunan tidak layak huni, serta tidak dilengkapi sarana dan prasarana utilitas (jalan, air bersih, air limbah, drainase dan sisten persampahan) yang baik dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.

Kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas sebanyak 16 (enam belas) lokasi kawasan dengan luas kawasan kumuh sekitar 225,54ha, dengan prioritas perencanaan pada kawasan kumuh Selat Hilir. Secara jelas, lokasi kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Kapuas disajikan sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kapuas (2015)

Tabel 1. Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Kabupaten Kapuas

Lokasi Kumuh	Tipologi Kumuh	Luas (ha)	Tingkat Kekumuhan	Tingkat Pertimbangan Lain	Status Lahan	Skala Prioritas	Penanganan
Kelurahan Selat Tengah	Permukiman Kumuh di Tepi Air	10.83	Sedang	Tinggi	Tidak Legal	2	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Kelurahan Selat Hulu	Permukiman Kumuh di Tepi Air	20.36	Sedang	Tinggi	Tidak Legal	2	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Pulau Telo	Permukiman Kumuh di Tepi Air	14.58	Sedang	Tinggi	Tidak Legal	2	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Batanjung	Permukiman Kumuh di Tepi Air	6.41	Berat	Sedang	Tidak Legal	4	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Palamai1	Permukiman Kumuh di Tepi Air	3.4	Sedang	Rendah	Tidak Legal	8	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Palampai 2	Permukiman Kumuh di Tepi Air	6.6	Sedang	Rendah	Tidak Legal	8	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Cemara Labat 1	Permukiman Kumuh di Tepi Air	4.85	Sedang	Rendah	Tidak Legal	8	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Cemara Labat 2	Permukiman Kumuh di Tepi Air	10.7	Sedang	Rendah	Tidak Legal	8	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Maluen	Permukiman Kumuh di Tepi Air	6.01	Berat	Tinggi	Tidak Legal	1	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Kelurahan Murung Keramat	Permukiman Kumuh di Tepi Air	8.31	Berat	Tinggi	Tidak Legal	1	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Kelurahan Panamas	Permukiman Kumuh di Tepi Air	7.5	Berat	Tinggi	Tidak Legal	1	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Pulau Mambulau	Permukiman Kumuh di Tepi Air	25.77	Berat	Tinggi	Tidak Legal	1	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan
Desa Sei Jangkit	Permukiman Kumuh di Tepi Air	6.2	Berat	Sedang	Tidak Legal	4	Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan

Sumber: Review DED Kawasan Kumuh Kabupaten Kapuas, 2015

Secara Geografis Kabupaten Kapuas terletak pada 00 8' 48" - 30 27' 00" LS dan 1130 2' 36" - 1140 44' 00" BT yang meliputi luas wilayah 14.999 Km² (9,77% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah) dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan

Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah 14.999 km² (9,77 % dari luas Kalimantan Selatan) dimana luas tersebut sudah termasuk zona perairan laut, terbagi atas 213 desa dan 17 Kecamatan seperti yang terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Luas Kecamatan dan Prosentase Terhadap Kabupaten

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km ²)	% Terhadap Kabupaten	Ibukota Kecamatan
1.	Kapuas Kuala	11	348,08	2,32	Lupak Dalam
2.	Kapuas Timur	7	202	1,35	Anjir Serapat
3.	Selat	6	111,74	0,74	Kuala Kapuas
4.	Basarang	14	206	1,37	Basarang
5.	Kapuas Hilir	8	91	0,61	Barimba
6.	Pulau Petak	9	135	0,90	Sei Tatas
7.	Kapuas Murung	21	273,09	1,82	Palingkau Baru
8.	Kapuas Barat	11	504,23	3,36	Mandomai
9.	Mantangai	30	6.103,77	40,69	Mantangai
10.	Timpah	9	2.016,00	13,44	Timpah
11.	Kapuas Tengah	23	1.145,00	7,63	Pujon
12.	Kapuas Hulu	12	1.274,00	8,49	Sei Hanyo
13.	Dadahup	15	217,91	1,45	Dadahup
14.	Tamban Catur	7	78,92	0,53	Tamban Catur
15.	Bataguh	14	282,26	1,88	Bataguh
16.	Pasak Talawang	8	687	4,58	Jangkang
17.	Mandau Talawang	8	1.323,00	8,82	Sei Pinang
	Total	213	14.999,00	100,00	

Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka 2012

Potensi dan Masalah Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kapuas

Potensi dan masalah di BWP Kuala Kapuas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Potensi dan permasalahan internal berisi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BWP Kuala Kapuas berdasarkan kondisi saat ini dan perkiraan ke depan. Variabel-variabel dominan yang menjadi kekuatan antara lain kesesuaian dan daya dukung lahan yang tinggi untuk penggunaan pertanian dan kawasan agrowisata, pola ruang yang terpusat untuk mendukung system kelembagaan kawasan agrowisata dan pertanian, dan secara ekonomi memiliki komoditas unggulan yang berskala local dan regional (padi) yang mendukung terciptanya kawasan agrowisata. Sedangkan kelemahan dominan yang harus dibenahi antara lain pola ruang yang

tersebar/terserak dan belum terstrukturisasinya system ekonomi serta sarana prasarana yang mendukung kawasan agrowisata dan pertanian.

Potensi dan permasalahan eksternal dapat disebut sebagai peluang dan ancaman untuk BWP Kuala Kapuas. Potensi atau peluang yang dimiliki BWP Kuala Kapuas antara lain relatif tingginya daya dukung dan daya tampung lahan di BWP Kuala Kapuas, peluang dari efek multiplier rencana rel kereta api luar Kota Kapuas dan dan pembangunan pelabuhan samudera di batanjung. Sedangkan ancaman yang dihadapi antara lain belum adanya rencana teknis terinci untuk penataan ruang, potensi sektor basis belum berkembang optimal dan rendahnya aksesibilitas sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah pengembangan.

Tabel 3. Permasalahan dan Potensi Kawasan Kumuh Kabupaten Kapuas

Isu - Permasalahan	Potensi/Peluang Pengembangan	Tantangan dan Kebutuhan Pengembangan
Penataan Pengembangan permukiman baru dari permasalahan penurunan kualitas permukiman lama	Pengembangan permukiman swadaya dengan kepadatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan perkembangan permukiman sesuai arahan RTRW dan RDTR • Integrasi antar kawasan permukiman swadaya yang ada maupun yang akan berkembang
	Adanya rencana pengembangan aktivitas skala regional (pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana dan prasarana transportasi) ke depan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan perkembangan permukiman sesuai arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR • Penyediaan kawasan permukiman dengan penerpaan konsep kasiba dan lisiba • Perluasan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
	Pengembangan permukiman sesuai dengan potensi wilayah hiterland sebagai agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan lahan kosong menjadi kawasan produktif yang terintegrasi dengan permukiman yang ada
Bangunan semi permanen tersebar di seluruh Perkotaan Kapuas	Perbaikan lingkungan/kampung	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga agar kawasan ini tidak menjadi kawasan kumuh • Secara bertahap meningkatkan kualitas permukiman : <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan dan pelebaran jalan - Pengadaan RTH skala lingkungan - Penyediaan drainase lingkungan - Perbaikan sistem persampahan - Peningkatan kualitas bangunan
	Peremajaan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan konsep konsolidasi lahan dengan mengajak masyarakat untuk berkerja sama dalam perbaikan kawasan dan penyediaan fasilitas lingkungan permukiman • Merencanakan kawasan mix-used
Kawasan Kumuh di perkotaan Kapuas		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya revitalisasi permukiman dan dapat mengarah kepada pemindahan sebagian perumahan • Perlu adanya konsolidasi lahan di kawasan kota lama untuk meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana utilitas • Peningaktan kesejahteraan masyarakat dalam aspek penghasilan masyarakat • Peningaktan kualitas bangunan perumahan
Lahan-lahan kosong di sekitar perumahan terstruktur berpotensi menjadi kantong-kantong permukiman padat tidak teratur	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa diarahkan menjadi kawasan permukiman terstruktur/ formal oleh pengembang • Adanya konsolidasi lahan untuk meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana utilitas 	Integrasi antar kawasan perumahan terstruktur yang ada dengan permukiman sekitar

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan yang didapat adalah: Potensi dan permasalahan pada kawasan Permukiman kumuh di kabupaten Kapuas memerlukan suatu pendekatan Tribina, adalah suatu pendekatan yang menerapkan tiga sasaran pembinaan yaitu bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha dalam penanganan pembangunan perumahan dan permukiman.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai instansi terkait yaitu 1). Perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman di perkotaan meliputi perbaikan kawasan kumuh, peremajaan kawasan kumuh guna peningkatan pemanfaatan lahan dan tertib bangunan, serta pengurangan dampak sosial dan kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana, penanganan kawasan kumuh yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan (melalui pemindahan/relokasi permukiman, dengan tetap memperhatikan kesinambungan kerja penghuni dan meningkatkan pendapatan masyarakat 2). Pemugaran perumahan dan permukiman di pedesaan meliputi perumahan dan permukiman, jalan desa, dan listrik.

Tantangan/kebutuhan dalam pengembangannya antara lain:

- Perlu adanya revitalisasi permukiman dan dapat mengarah kepada pemindahan sebagian perumahan
- Perlu adanya konsolidasi lahan di kawasan kota lama untuk meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana utilitas antara lain
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aspek penghasilan masyarakat
- Peningkatan kualitas bangunan perumahan

Saran

Saran-saran untuk keberlanjutan penelitian ini adalah:

Perlu adanya program Bina manusia yaitu yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan secara mandiri dengan mengandalkan pada pemanfaatan sumber-sumber daya yang tersedia baik dalam dirinya maupun lingkungan kehidupan mereka.

Perlu adanya penelitian lanjutan yang tentang Penanganan Fisik kawasanpermukiman Kumuh Kabupaten Kapuas

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Budiharjo, Eko. 1994. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. 2006. *Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh*.
- Dirjen Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. 2006. *Panduan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kota*. Dirjen Cipta Karya.
- Djemabut, Blaang. 1986, *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Daldjoeni, N. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni, Bandung.
- Heinz Frick. 1984. *Rumah Sederhana Kebijakan Perencanaan dan Kontruksi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haryadi, Setiawan, B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Teori, Metodologi dan Aplikasi, Kerjasama Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Jayadinata, T. 1986. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- Herlianto, M. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung, 1986
- Kuswartojo, Tjuk dkk, *Perumahan dan permukiman di Indonesia*, ITB Bandung, 2005
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik, Raionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Alumni, Bandung.
- Sastra M, Suparno, *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*, ANDI Yogyakarta, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, 2001, Jakarta